

Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Periode 2003-2007 di Kabupaten Karanganyar”.

Triani

Alumnus STIE Widya Manggala Semarang

Yeni Kuntari

Staf Pengajar STIE Widya Manggala Semarang

ABSTRACT

The research was quantitative research that used secondary data namely data of physical and documentary data. Later in this study, focusing only examined financial data Karanganyar District in the period 2003-2007. Method of analysis in this study used testing conducted by testing the effects of independent variables to the dependent variable. Analysis tools used in the study was quantitative analysis. Quantitative analysis was divided into two, namely the classical assumption test and multiple linear regression test.

Keyword: macro variables (GDP, population, and the inflation rate), Receiving the Regional Revenue (PAD)

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam era kebijakan otonomi daerah, desentralisasi memegang peranan penting dalam mewujudkan keberhasilan otonomi daerah. Desentralisasi sendiri adalah suatu penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004). Menurut Haris (2005:8) tujuan utama dari kebijakan desentralisasi tahun 1999 adalah untuk membebaskan pemerintah pusat dari beban-beban yang tidak perlu menangani urusan domestik, dengan itu diharapkan pemerintah pusat lebih mampu berkonsentrasi pada perumusan kebijakan makro nasional yang bersifat strategis. Dilain pihak, daerah otonom akan mengalami proses pemberdayaan yang signifikan. Hal tersebut yang digunakan sebagai dasar kebijakan otonomi daerah.

Ketetapan MPR No. XV/MPR/1998 yang berisi tentang, “Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Peraturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia”, hal ini merupakan landasan hukum dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (PKPD) yang kemudian disempurnakan menjadi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan tujuan, jika pemerintah memberikan pembinaan dan pemberian pedoman melalui penelitian, pengembangan, perencanaan, dan pengawasan. Selain itu juga ditetapkannya standart, arahan, bimbingan, pelatihan, supervisi, pengendalian, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi. Maka dari itu pemerintah pusat harus

memberikan kemudahan peluang, bantuan, dan mendorong daerah otonom agar pelaksanaan otonomi daerahnya berjalan efisien dan efektif.

Untuk menjamin terselenggaranya otonomi daerah yang mantap, serta dapat mengatasi masalah seperti kemiskinan dan kesejangan distribusi pendapatan diperlukan usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan keuangan sendiri yakni melalui peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Untuk itu dalam pelaksanaan pembangunan daerah otonom yang mandiri, perlu melihat lagi faktor-faktor seperti sumber daya manusia dan faktor dana yang dimiliki oleh masing-masing daerah. Faktor dana ini dapat dilakukan dengan mengupayakan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk itu diperlukan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah.

Simanjuntak (dalam Halim, 2001:101), beliau mengemukakan dalam penelitiannya yang berjudul, “ Analisis Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada Kabupaten Simalungun Propinsi Sumatera Utara” bahwa potensi Pendapatan Asli Daerah adalah kekuatan yang ada disuatu daerah untuk menghasilkan sejumlah penerimaan Pendapatan Asli Daerah. Untuk mengetahui potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) dibutuhkan pengetahuan tentang analisis perkembangan beberapa variabel yang dapat dikendalikan dan variabel yang tidak dapat dikendalikan.

Variabel yang dapat dikendalikan yakni variabel-variabel kebijakan dan kelembagaan yang diatur oleh pemerintah daerah itu sendiri. Dan variabel ini tidak menyediakan data berupa angka-angka sehingga jika dipakai dalam sebuah penelitian tidak dapat diukur secara objektif pengaruhnya terhadap penerimaan PAD. Namun, variabel ini merupakan variabel pengontrol akan kesuksesan peningkatan PAD suatu daerah. Variabel-variabel ini antara lain seperti berikut:

- a. Kondisi awal suatu daerah
- b. Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD.
- c. Pengadaan pembangunan baru
- d. Mencari sumber pendapatan baru
- e. Perubahan peraturan
- f. Penyesuaian tarif.

Selain variabel yang dapat dikendalikan, juga terdapat variabel yang tidak dapat dikendalikan. Untuk menilai peningkatan Pendapatan Asli Daerah dapat dinilai dengan memakai variabel-variabel yang tidak dapat dikendalikan yakni variabel-variabel makro ekonomi yang dapat mempengaruhi peningkatan Pendapatan Asli Daerah antara lain seperti :

- a. Perkembangan PDRB perkapita riil
- b. Jumlah Penduduk
- c. Tingkat Inflasi

Suyanto, dan Nusantoro (2008) juga meneliti hal serupa dalam penelitiannya yang berjudul, “Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro”. Menurutnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah (PAD), yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk dan inflasi dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. *Faktor pertama* yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto. PDRB ini dapat berasal dari pertanian, pertambangan, industri, listrik, gas, air, konstruksi, perdagangan, transport, bank, dan lain-lain.
2. *Faktor kedua* yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah jumlah penduduk. Dalam hal ini penduduk dapat dianggap sebagai faktor pendukung dan faktor penghambat didalam

pembangunan. Sebagai faktor pendukung yaitu dengan penduduk yang besar merupakan pangsa pasar yang sangat potensial, apabila populasi penduduk ini dikelola dengan baik dan tepat oleh Pemerintah Daerah. Selanjutnya besarnya penduduk juga dapat dianggap sebagai faktor penghambat jika besarnya penduduk tidak mempunyai kualitas yang cukup baik untuk ikut melaksanakan program pembangunan, sehingga jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban pemerintah saja.

3. *Kemudian faktor terakhir* yang mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah adalah tingkat inflasi. Faktor inflasi merupakan variabel makro yang penting dan bermanfaat dalam formulasi kebijakan ekonomi ditingkat nasional maupun lokal/daerah. Beberapa manfaatnya antara lain dalam menjaga stabilitas harga, menentukan tingkat upah, mengevaluasi usulan pajak dan penyesuaian perhitungan pendapatan.

Kebijakan pemerintah daerah dalam mengelola dan menggali sumber-sumber penerimaan daerah di Kabupaten Karanganyar akan lebih jelas jika melihat variabel makro seperti, Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, inflasi. Dalam analisisnya bahwa Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan tingkat inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dapat dilihat melalui tabel pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto, penduduk, inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), sebagai berikut :

Tabel 1.1

Pertumbuhan PDRB, penduduk, inflasi terhadap PAD Kabupaten Karanganyar

Tahun	PDRB (jutaan)	Penduduk	Inflasi (%)	Target PAD (ribuan)	Realisasi PAD (ribuan)
2003	1.290.163	832.203	2,51	23.665.569	25.169.918
2004	4.142.109	830.460	5,31	27.490.696	29.485.262
2005	4.188.330	838.182	14,20	31.618.494	34.302.565
2006	4.401.301	844.634	6,41	36.634.670	46.052.120
2007	4.654.054	851.366	4,09	53.050.726	56.889.064

Sumber : Kabupaten Karanganyar dalam angka 2008

Berdasarkan data pada tabel terlihat bahwa pertumbuhan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) meningkat terus disetiap tahunnya. Kemudian penambahan penduduknya yang tidak terlalu besar dan cenderung konstan setiap tahunnya. Diikuti oleh perkembangan tingkat inflasinya yang berfluktuatif dengan tingkat inflasi terbesar yaitu pada tahun 2005 mencapai 14,20 %. Sementara itu antara target dan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam setiap tahun selalu melebihi apa yang ditargetkan. Hal ini menyimpulkan bahwa kondisi keuangan daerah Kabupaten Karanganyar dalam keadaan yang dinamis.

Berdasarkan uraian di atas tentang fenomena perkembangan beberapa variabel makro, maka ditemukan adanya kecenderungan bahwa terjadinya peningkatan dan penambahan Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dapat diindikasikan pendapatan penduduk juga akan meningkat. Selanjutnya, kemampuan membayar pungutan (pajak daerah) juga akan menungkat dan diikuti dengan peningkatan penerimaan PAD. Sehubungan dengan itu maka muncul pertanyaan apakah perkembangan variabel makro yaitu Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB), jumlah penduduk, dan inflasi berpengaruh terhadap penerimaan Pendapatan Asli

Daerah (PAD) dan sejauh mana respon perkembangan variabel makro terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar.

Perumusan Masalah

Potensi ekonomi dapat dilihat dari beberapa indikator ekonomi makro antara lain adalah PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi. Sedangkan kemampuan keuangan daerah dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Daerah dalam menggali sumber-sumber penerimaan terutama dari PAD.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besarkah variabel makro seperti, PDRB, jumlah penduduk, dan tingkat inflasi mempengaruhi penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar ?
2. Variabel makro (PDRB, jumlah penduduk, inflasi) manakah yang paling berpengaruh terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar?

Tujuan Penelitian

Tujuan Umum

Untuk mengetahui pengaruh variabel makro seperti PDRB , jumlah penduduk, tingkat inflasi terhadap penerimaan PAD Kabupaten Karanganyar.

Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui seberapa besar PDRB dalam mempengaruhi penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar.
2. Untuk mengetahui seberapa besar jumlah penduduk dalam mempengaruhi penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar.
3. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat inflasi dalam mempengaruhi penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar.

Landasan Teori

Pendapatan Asli Daerah

Menurut Halim (2002:64) menyatakan Pendapatan Asli Daerah adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 1 UU No. 32 Tahun 2004 yang dimaksud dengan pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambahan nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.

Berbicara mengenai sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), tidak dapat dipisahkan dari pendapatan daerah secara keseluruhan. Menurut UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, maka dari itu sumber pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan Asli Daerah, terdiri dari:
 - a. Pajak Daerah
 - b. Retribusi Daerah terbagi menjadi tiga golongan yaitu:
 1. Retribusi jasa umum
 2. Retribusi jasa usaha
 3. Retribusi perizinan tertentu

- c. Hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah.
 - d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.
2. Dana perimbangan, ini terdiri dari :
 - a. Bagian daerah dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan penerimaan dari sumber daya alam.
 - b. Dana Alokasi Umum (DAU).
 - c. Dana Alokasi Khusus (DAK).
 3. Pinjaman Daerah
 4. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Menurut Purnastuti dan Indah Mustikawati (2007:113) mendefinisikan PDRB sebagai total nilai pasar semua barang dan jasa yang diproduksi suatu wilayah regional atau propinsi selama kurun waktu satu tahun. Selanjutnya, PDRB dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah (BPS,2007:1).

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang atau jasa dihitung menggunakan harga pada tahun sekarang dan digunakan untuk melihat pergeseran dan struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang atau jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun konstan dan digunakan untuk mengetahui ekonomi dari tahun ke tahun.

Penduduk

Penduduk dapat didefinisikan sebagai penghuni suatu negara yang merupakan semua orang yang pada suatu waktu mendiami wilayah negara (Triwulantutik, 2006: 227). Penduduk secara lazim dinamakan 'rakyat'dari negara tersebut, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh suatu rasa persamaan dan yang bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu.

Selanjutnya menurut Soepomo, (dalam Triwulantutik, 2006:227) menyatakan bahwa penduduk ialah orang yang dengan sah bertempat tinggal tetap dalam suatu Negara. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan sah yaitu tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan mengenai masuk dan mengadakan tempat tinggal tetap dalam negara yang bersangkutan. Selain penduduk dalam suatu wilayah Negara ada orang lain yang bukan penduduk (*niet-ingezetenen*), misalnya seorang wisatawan yang berkunjung dalam suatu negara.

Inflasi

Menurut Samuelson dan Nordhaus (1997: 296), mengemukakan definisi inflasi adalah kejadian apabila tingkat harga-harga dan biaya-biaya umum naik, seperti harga beras, bahan bakar mobil naik, tingkat upah, harga tanah, sewa barang modal juga naik. Selanjutnya menurut Sukrino (2004:15) mengemukakan definisi inflasi sebagai suatu proses kenaikan harga-harga yang berlaku dalam suatu perekonomian, dan menurutnya ada istilah inflasi merayap yang diartikan sebagai proses kenaikan harga-harga barang yang lambat.

Selain itu inflasi juga didefinisikan sebagai suatu gejala dimana tingkat harga umum mengalami kenaikan secara terus menerus (Nanga, 2001:241). Menurut Rahardja (2004:155) menjelaskan bahwa inflasi adalah gejala kenaikan harga barang-barang yang bersifat umum dan terus-menerus.

Review Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu sangat penting sebagai dasar pijakan dalam rangka penyusunan penelitian ini. Penelitian terdahulu yang dijadikan acuan dalam penelitian ini adalah, penelitian yang dilakukan oleh Suyanto dan Nusantoro (2008) dengan judul, “Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Kota Metro”. Dalam penelitian tersebut data yang diambil bersumber dari laporan keuangan Kota Metro, dengan populasi semua tahun periode anggaran di Kota Metro dan sampel sebanyak enam tahun yaitu dari tahun 2001-2006.

Dari hasil analisis statistik dengan tingkat signifikansi 5% menunjukkan bahwa PDRB, penduduk dan tingkat inflasi secara individual dan secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap penerimaan PAD Kota Metro.

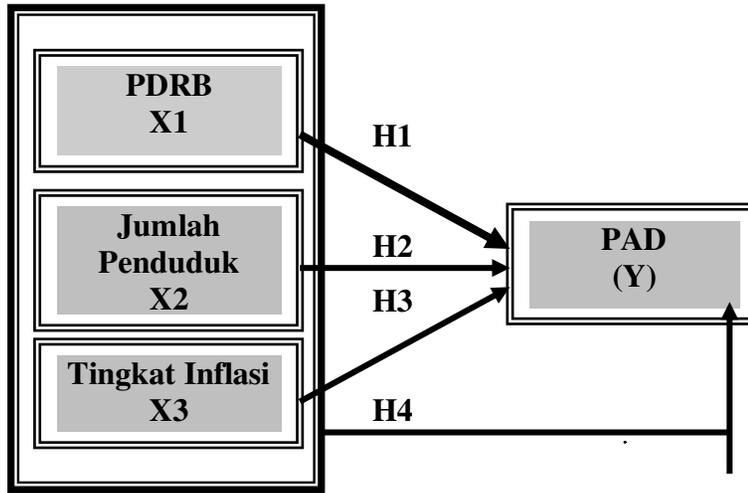
Uji F hitung diperoleh sebesar 80,103 lebih besar dari nilai tabel yaitu 19,16, selanjutnya nilai Sig sebesar 0,012 menunjukkan bahwa H_0 ditolak, yang berarti bahwa variabel makroekonomi yang terdiri dari PDRB (x1), jumlah penduduk (x2) dan inflasi (x3) yang merupakan variabel bebas secara simultan atau secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap PAD (Y) di Kota Metro.

Untuk *uji t* Koefisien Slope variabel PDRB adalah sebesar 1,144 dengan *t hitung* sebesar 1,859 dan Sig sebesar 0,204. Koefisien Slope variabel jumlah penduduk (PDDK) adalah 1,081 dengan *t hitung* sebesar 0,954 dan Sig sebesar 0,441. Sedangkan Koefisien Slope variabel inflasi adalah -0,157 dengan *t hitung* sebesar -1,851 dan Sig sebesar 0,205. Nilai *t tabel* untuk uji ini adalah sebesar 0,337 yang diperoleh dengan alpha 5 % dan df sebesar 5 (n-1), maka, Koefisien slope signifikan atau menolak H_0 untuk variabel PDRB dan jumlah penduduk dengan PAD sedangkan koefisien slope tidak signifikan atau menerima H_0 untuk variabel inflasi dengan PAD.

Kerangka Pikir

Untuk mendukung suatu penelitian agar masalah yang dibahas dapat dipecahkan dengan jelas dan terarah, maka diperlukan adanya kerangka pemikiran yang benar dan mengarah. Untuk itu penjelasan dalam penelitian ini mengadopsi dari penelitian Suyanto dan Nusantoro (2008:3) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Variabel Makro Terhadap Penerimaan PAD di Kota Metro”, sehingga muncul suatu kerangka pemikiran dalam penelitian ini yang harus dilakukan pengujian berkaitan dengan perkembangan variabel makro yaitu PDRB, jumlah penduduk dan tingkat inflasi terhadap penerimaan PAD khususnya di Kabupaten Karanganyar, dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber :Kajian penelitian Suyanto dan Nusantoro (2008:3)

Hipotesis

Hipotesis merupakan suatu anggapan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya, di mana anggapan sementara adalah PDRB, jumlah penduduk dan inflasi akan mempengaruhi penerimaan PAD suatu daerah, maka berdasarkan penjelasan di atas serta berdasarkan hasil penelitian Suyanto dan Nusantoro (2008:5-7) maka hipotesis yang diketengahkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Variabel PDRB berpengaruh positif terhadap Penerimaan PAD
- H₂ : Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap Penerimaan PAD
- H₃ : Variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap Penerimaan PAD
- H₄ : Variabel makro (PDRB, jumlah penduduk, inflasi) berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan PAD.

Metode Penelitian

Jenis Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data fisik dan data dokumenter. Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Data gambaran umum kabupaten Karanganyar .
2. Data penerimaan PAD kabupaten Karanganyar dari tahun 2003-2007.
3. Data jumlah penduduk kabupaten Karanganyar dari tahun 2003-2007.
4. Data perkembangan PDRB kabupaten Karanganyar dari tahun 2003-2007
5. Data perkembangan laju inflasi kabupaten Karanganyar dari tahun 2003-2007.

Dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain (Setiawan, 2005:163). Data sekunder yang digunakan dalam

penelitian ini adalah data yang bersumber dari BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi JawaTengah.

Populasi

Dalam penelitian ini merupakan penelitian populasi dan disebut juga studi populasi atau studi sensus karena hanya meneliti semua elemen yang ada dalam wilayah penelitian. Berdasarkan Arikunto (2002:108) menyebutkan bahwa penelitian populasi dilakukan apabila peneliti ingin melihat semua liku-liku yang ada di dalam populasi. Oleh karena subjeknya meliputi semua yang terdapat di dalam populasi. Sehingga objek pada populasi diteliti, hasilnya dianalisis, disimpulkan, dan kesimpulannya itu berlaku untuk seluruh populasi. Menurut penjelasan tersebut maka dalam penelitian ini tidak menggunakan sampel.

Metode pengumpulan data

Penelitian ini adalah: menggunakan metode dokumentasi. Dibanding dengan metode lain, maka metode ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliruan sumber datanya masih tetap, karena metode dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati. Dalam penelitian ini berupa menggunakan data tertulis yaitu data PAD, PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi kabupaten Karanganyar dari tahun (2003-2007) yang telah dibuat oleh BPS (Badan Pusat Statistik) Propinsi Jawa Tengah 2008.

Metode Analisis Data

Alat analisis yang digunakan dalam penelitian adalah analisis kuantitatif. Analisis kuantitatif dibagi menjadi dua yaitu:

1. Uji asumsi Klasik

a. Uji Multikolinearitas

Untuk melihat ada atau tidaknya multikolonearitas dalam model regresi dapat dilihat dari (1) nilai tolerance dan lawannya (2) variance inflation faktor (VIF). Cara untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai tolerance $<0,10$ atau sama dengan nilai VIF >10 .

b. Uji heteroskedastisitas

. Dasar analisisnya adalah:

- Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk pola teratur, maka telah teridentifikasi terjadi heterokedastisitas.
- Jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heterokedastisitas.

c. Uji Autokorelasi

Tujuan dari uji autokorelasi untuk mengetahui apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t-1 sebelumnya. Jika terjadi korelasi, maka ada problem autokorelasi

d. Uji Normalitas

Bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu memiliki distribusi normal. Seperti yang diketahui bahwa uji t dan uji F mengasumsikan bahwa nilai residual/pengganggu mengikuti distribusi normal. Kalau asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel kecil.

2. Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini tehnik analisis yang akan dipergunakan adalah tehnik analisis data kuantitatif, yaitu metode persamaan linier berganda atas tiga variabel bebas melalui uji “F” dan uji “t” dengan tingkat signifikan pengujian sebesar 5%.

Adapun bentuk umum persamaan linier berganda dengan tiga variabel bebas adalah sebagai berikut:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \varepsilon$$

Dimana:

Y	=	Pendapatan Asli Daerah
β_0	=	Konstanta
$\beta_1, \beta_2, \beta_3$	=	Koefisien regresi
X_1	=	PDRB
X_2	=	Jumlah Penduduk
X_3	=	Inflasi
ε	=	Error

Uji hipotesisi untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat perlu dilakukan pengujian signifikansi 5% dengan langkah-langkah sebagai berikut :

Alat Pengujian Hipotesis, sebagai berikut :

a) Uji Hipotesis

1. Uji t

Dilakukan untuk menentukan tingkat signifikan secara individual setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila nilai t hitung < t tabel, maka variabel bebas tersebut tidak signifikan sebagai estimator PAD, sebaliknya jika t hitung > t tabel, maka variabel bebas tersebut signifikan sebagai estimator PAD.

2. Uji f

Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap PAD digunakan uji f dengan tingkat signifikansi 5% sebagai berikut:
Apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, maka semua variabel bebas secara bersama-sama tidak dapat digunakan untuk memprediksi peningkatan PAD.

3. Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi sampel merupakan proporsi dari variasi total y yang dijelaskan oleh hubungan y dengan x. Koefisien R^2 akan bernilai 0 apabila tidak ada variasi y yang dijelaskan oleh hubungan tersebut, R^2 akan bernilai 1 jika semua variasi y dijelaskan, dan R^2 akan bernilai antara 0 dan 1 jika hanya sebagian variasi y dijelaskan oleh hubungan tersebut. Koefisien determinasi menunjukkan besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel yang dipengaruhi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Uji Asumsi Klasik

Untuk mengetahui model yang baik secara statistik, maka harus dipenuhi pengujian asumsi klasik yang merupakan gangguan dalam analisis yang menggunakan alat uji statistik dengan *ordinary linier regression* (OLS), baik yang berupa multikolinearitas, heteroskedastisitas, autokorelasi dan normalitas.

a. Uji multikolinearitas

Tabel. 1.2
Uji Multikolonearitas

Variabel	Statistics	
	Collinearity	Tolerance
Independen		VIF
PDRB	0,318	3,145
Jumlah Penduduk	0,332	3,016
Inflasi	0,928	1,078
Variabel dependen	:PAD	

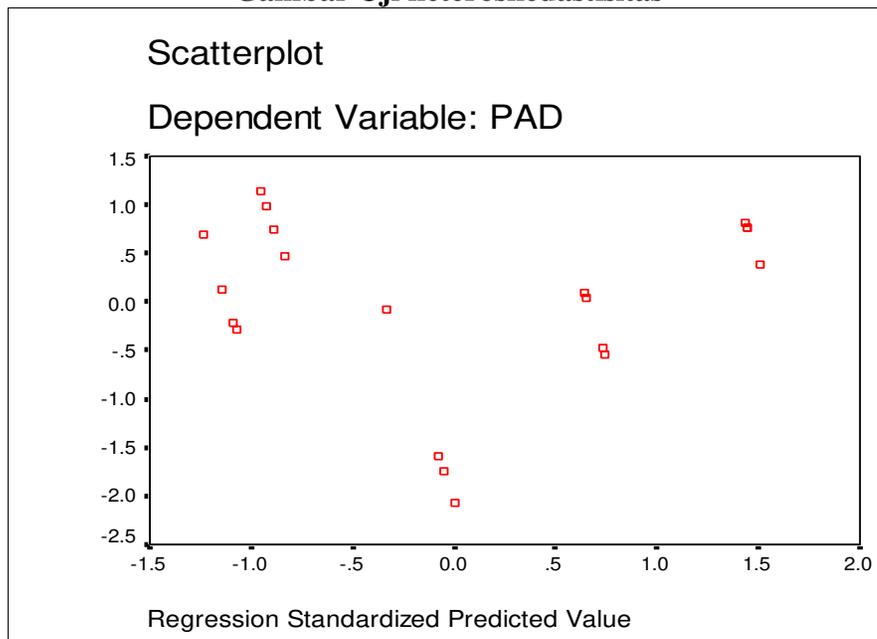
Sumber: Data sekunder 2008 yang diolah (Lihat lampiran 6)

Pada tabel 1.2 tersebut terlihat bahwa nilai tolerance lebih besar dari 0,1 atau nilai VIF yang kurang dari 10, hal ini berarti tidak ada korelasi antar variabel independen.

b. Uji heteroskedastisitas.

Untuk lebih jelasnya terlihat pada gambar 1.2 berikut ini:

Gambar. 1.2
Gambar Uji heteroskedastisitas



Sumber : Data sekunder 2008 yang diolah

Gambar 1.2 tersebut menunjukkan bahwa titik-titik tidak membentuk pola tertentu, hal ini berarti tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi ini.

c. Uji Autokorelasi

Tabel 1.3
Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
	.988	.977	.972	495504822.52	.777
a Predictors: (Constant), INFLASI, PDDK, PDRB b Dependent Variable: PAD					

Sumber: Data sekunder 2008 yang diolah

Dari table 1.3 tersebut diketahui bahwa:

nilai DW = 0,777, nilai tabel DW untuk , k = 3 dan n = 20 maka dapat terlihat nilai Du dan Dl sebagai berikut: Du = 1,676 dan Dl = 0,998

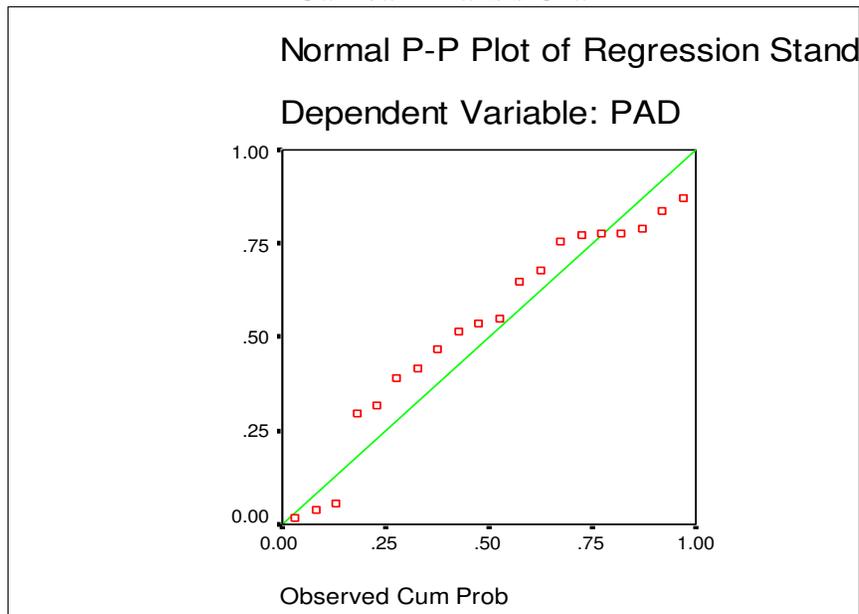
Dari data di atas dapat diketahui hasilnya, bahwa : $0 < d < dl$ yang berarti H0 ditolak, sehingga tidak ada autokorelasi positif dalam model regresi ini.

4. Uji Normalitas

1). Analisis Grafik

Jika distribusi data residual normal, maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya. Untuk lebih jelasnya lihat gambar 1.3, sebagai berikut:

Gambar. 1.3
Gambar Analisis Grafik



Sumber: Data sekunder 2008 yang diolah

2). Analisis statistik

Uji normalitas dengan melihat grafik seringkali menyesatkan. Secara visual terlihat normal, padahal secara statistik bisa sebaliknya. Oleh sebab itu paling baik dilengkapi dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Besarnya nilai K-S adalah 0,576 dan signifikan pada 0,895 ($p=0,895 > 0,05$) hal ini berarti H0 diterima yang berarti data residual terdistribusi normal.

2 Uji Regresi Linier Berganda

Dalam penelitian ini teknik analisis yang akan dipergunakan adalah teknik analisis data kuantitatif, yaitu metode persamaan linier berganda atas tiga variabel bebas melalui uji “F” (Uji secara simultan) dan uji “t” (Uji secara individual) dengan tingkat signifikan pengujian sebesar 5%.

Adapun bentuk umum persamaan linier berganda dengan tiga variabel bebas adalah sebagai berikut:

$$PAD = -0,269 \text{ PDRB} + 1,195 \text{ Penduduk} - 0,087 \text{ Inflasi}$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa konstanta β_0 tidak ada. Koefisien regresi faktor PDRB sebesar -0,269 menunjukkan bahwa penambahan PDRB sebesar Rp1,- akan menurunkan penerimaan PAD sebesar Rp-0,269,-. Koefisien regresi sebesar 1,195 menunjukkan bahwa penambahan penduduk 1 jiwa akan meningkatkan penerimaan PAD sebesar Rp1,195,-. Dan koefisien regresi faktor inflasi sebesar -0,087 menunjukkan bahwa penambahan tingkat inflasi 1% akan menurunkan penerimaan PAD sebesar Rp-0,087,-.

Uji hipotesis ini untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel bebas pada variabel terikat dengan signifikansi 5% dengan dua cara yaitu uji secara individual/uji “t” dan uji secara serentak/simultan/uji “F” adalah sebagai berikut :

1). Uji Hipotesis

a. Uji t

Dilakukan untuk menentukan tingkat signifikan secara individual setiap variabel bebas terhadap variabel terikat. Bila nilai t hitung < t tabel, maka variabel bebas tersebut tidak signifikan sebagai estimator PAD, sebaliknya jika t hitung > t tabel, maka variabel bebas tersebut signifikan sebagai estimator PAD.

1. Uji “t” untuk koefisien β_1 (PDRB)

Diketahui bahwa titik kritis yaitu antara -2,120 sampai 2,120 dengan t hitung sebesar -3,963. Maka dapat disimpulkan PDRB berpengaruh negative terhadap PAD

2. Uji “t” untuk koefisien β_2 (Penduduk)

Diketahui bahwa titik kritis yaitu antara -2,120 sampai 2,120 dengan t hitung sebesar 17,986. Maka dapat disimpulkan Penduduk berpengaruh positif terhadap PAD

3. Uji “t” untuk koefisien β_3 (inflasi)

Diketahui bahwa titik kritis yaitu antara -2,120 sampai 2,120 dengan t hitung sebesar -2,186 Maka dapat disimpulkan Inflasi berpengaruh negatif terhadap PAD

b. Uji f

Uji hipotesis untuk mengetahui pengaruh antara PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi terhadap PAD digunakan uji f dengan tingkat signifikansi 5% dengan titik kritis 3,2 dan F hitung sebesar 222,404 maka secara simultan variable makro berpengaruh terhadap PAD.

2). Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi sampel merupakan proporsi dari variasi total Y yang dijelaskan oleh hubungan Y dengan X. Koefisien R^2 sebesar = 0,977, hal ini menunjukkan bahwa besarnya hubungan variabel bebas terhadap variabel yang dipengaruhi sebesar 97,7%. Sehingga dalam penelitian ini hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat memiliki hubungan yang erat. Dan hanya ada 2,3 % variabel lain yang tidak masuk dalam model penelitian ini.

Pembahasan

Dalam kaitannya dengan tingkat penerimaan PAD, hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapat faktor seperti PDRB, jumlah penduduk, dan inflasi yang mempengaruhinya. Seperti yang telah diteliti dalam penelitian kali ini bahwa ketiga variabel independen yang dimasukkan dalam model yang di-*ekpektasi*-kan berpengaruh terhadap penerimaan PAD yaitu PDRB, jumlah penduduk, serta tingkat inflasi dan ternyata ketiganya memiliki nilai signifikan terhadap penerimaan PAD. Kondisi ini dibuktikan dengan hasil Uji bersama-sama semua variabel independen terhadap variabel dependen atau uji F yang menghasilkan nilai F sebesar 222,404 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 pada alfa 5%. Hasil ini menunjukkan bahwa ketiga variabel tersebut signifikan berpengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen-nya.

Hasil ini sesuai dengan kejadian dilapangan. Tingkat PDRB dalam beberapa tahun dapat menggambarkan kenaikan dan penurunan tingkat pendapatan masyarakat di daerah tersebut. Tarigan (2005:20) menyatakan kenaikan dan penurunan dapat dibedakan menjadi dua faktor yaitu:

1. Kenaikan/penurunan riil, yaitu kenaikan/penurunan tingkat pendapatan yang tidak dipengaruhi oleh faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan riil pendapatan penduduk berarti daya beli penduduk di daerah tersebut meningkat, misalnya mampu membeli barang yang sama kualitasnya dalam jumlah yang lebih banyak.
2. Kenaikan/penurunan pendapatan yang disebabkan adanya faktor perubahan harga. Apabila terjadi kenaikan pendapatan yang hanya disebabkan inflasi maka walaupun pendapatan meningkat tetapi jumlah barang yang mampu dibeli belum tentu meningkat. Perlu dilihat mana yang meningkat lebih tajam, tingkat pendapatan atau tingkat perubahan harga (inflasi)

Hal tersebut mengindikasikan peningkatan PDRB atas dasar harga konstan dapat menjadi indikator atau variabel yang mempengaruhi penerimaan PAD. Begitu pula dengan jumlah penduduk dapat dikaitkan dengan penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar. Pasalnya, besarnya pendapatan dapat dipengaruhi oleh jumlah penduduk. Jika jumlah penduduk meningkat maka pendapatan yang dapat ditarik juga ikut meningkat. Inflasi merupakan faktor yang penting dalam mempengaruhi penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar, pasalnya jika inflasi tinggi maka akan menyebabkan pendapatan jadi rendah. Untuk itu tingkat inflasi harus dikendalikan oleh pemerintah setempat.

Variable PDRB berpengaruh negative ini Maka mengasumsikan tentang bagaimana kepatuhan masyarakat Kabupaten Karanganyar dalam membayar pungutan pajak daerah dan bagaimana kebijakan pemerintah daerah Kabupaten Karanganyar dalam penetapan kebijakan pembayaran pajak beserta ketetapan tarif pajaknya. Keadaan hasil perbandingan pajak daerah dan retribusi daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di kabupaten karanganyar, dapat dilihat dari tabel 5.7 di bawah ini:

Tabel 5.7
Perbandingan Hasil Pajak dan Retribusi Daerah dengan penerimaan PAD di Kabupaten karanganyar

Tahun	Pajak	Retribusi daerah	PAD
2003	10.007.809.661	9.518.351.073	25.196.918.699
2004	11.572.405.687	10.590.885.422	29.485.262.726
2005	13.158.093.041	11.175.915.881	34.302.565.951
2006	14.543.182.743	13.820.693.294	46.052.120.123
2007	19.053.558.538	15.799.304.089	56.889.064.224

Sumber: Kabupaten dalam angka 2008

Dari tabel di atas terlihat bahwa pajak dan retribusi daerah di Kabupaten Karanganyar selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun jika kita amati lebih lanjut, persentase perbandingan antara pajak dan retribusi daerah jika dibandingkan dengan penerimaan PAD setiap tahunnya, dapat dilihat dari tabel 5.8. di bawah ini:

Tabel:5.8
Perbandingan antara Pajak dan Retribusi Daerah terhadap PAD
di Kabupaten Karanganyar

Tahun	Pajak	Retribusi daerah
2003	39,7%	37,7%
2004	39,2%	35,9%
2005	38,3%	32,6%
2006	31,6%	30%
2007	33,5%	27,7%

Sumber: Kabupaten dalam angka 2008 yang diolah

Dari table 5.8. di atas terlihat bahwa persentase hasil perbandingan pajak daerah di Kabupaten Karanganyar dalam mendukung penyusunan PAD dari tahun 2003-2006 mengalami penurunan tiap tahunnya, dan pada tahun 2007 mengalami kenaikan yang relative kecil. Sedangkan persentase hasil perbandingan retribusi daerah di Kabupaten Karanganyar dalam mendukung penyusunan PAD dari tahun 2003-2007 mengalami penurunan tiap tahunnya.

Hasil analisis ini menjelaskan, mengapa variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar, pasalnya kontribusi pajak dan retribusi daerah dalam penyusunan PAD Kabupaten Karanganyar mengalami penurunan akan tetapi PDRBnya selalu meningkat tiap tahunnya. Kondisi inilah yang menyebabkan variabel PDRB yang seharusnya berpengaruh positif terhadap penerimaan PAD, menjadi berpengaruh negatif.

Variabel jumlah penduduk secara statistik signifikan berpengaruh terhadap penerimaan PAD. Signifikansi ini dibuktikan dengan hasil Uji regresi partial dimana diperoleh angka t hitung 17,986 dengan tingkat signifikan 0,000. Dengan hasil ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

Variabel ketiga yang diuji dalam penelitian ini adalah inflasi, sesuai dengan hasil perhitungan regresi berganda menunjukkan berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PAD. Hasil ini ditunjukan dengan hasil t hitung sebesar -2,186 dengan tingkat signifikan 0,044. Sehingga variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap penerimaan PAD. Bila dikaitkan dengan kondisi lapangan, maka hasil penelitian ini sesuai dengan kejadian riil, pasalnya semakin tinggi inflasi di suatu daerah maka semakin tinggi pula beban yang harus di tanggung pemerintah daerah dalam meningkatkan kesejahteraan raketnya.

Kesimpulan

Tujuan utama dalam penelitian ini adalah untuk meneliti variabel-variabel yang mempengaruhi PAD di Kabupaten Karanganyar pada periode tahun anggaran 2003-2007. Berdasarkan hasil perhitungan dari SPSS maka dapat diketahui persamaan regresi, $Y = -0,269 \text{ PDRB} + 1,195 \text{ Penduduk} - 0,087 \text{ Inflasi}$ serta pembahasan sebelumnya, maka penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa:

1. Variabel PDRB berpengaruh negatif terhadap peningkatan penerimaan PAD di Kabupaten Karanganyar. Sehingga jika PDRB meningkat Rp 1,00 akan menurunkan penerimaan PAD sebesar Rp 0,269.
2. Variabel jumlah penduduk berpengaruh positif terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Karanganyar. Hal ini menunjukkan apabila penambahan 1 orang penduduk akan meningkatkan PAD sebesar Rp 1,195.
3. Dan yang terakhir, variabel inflasi berpengaruh negatif terhadap peningkatan PAD di Kabupaten Karanganyar. Sehingga peningkatan 1% inflasi akan menyebabkan penurunan penerimaan PAD sebesar 0,087 %.
4. Model dalam penelitian ini memiliki koefisien determinasi (R^2) sebesar 97,7%. Hal ini menunjukkan, bahwa dalam penelitian ini ketiga variabel bebas yaitu PDRB, jumlah penduduk dan inflasi memiliki keeratan hubungan yang erat dengan variabel terikat yaitu PAD. Sisanya 2,3 % yaitu variabel lain yang mempengaruhi PAD yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim. 2004. UU RI No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Semarang: CV Duta Nusindo.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek. Edisi Revisi. Jakarta: Rineka Cipta.
- BPS. 2007. PDRB Kota Semarang Tahun 2007: Semarang.
- Cahyono, Tri. 2009. "Analisi Faktor-Faktor yang Mempengaruhi PAD Kabupaten Karanganyar Periode 1990-2002". Solo: UPT Perpustakaan UNS. (diunduh dari <http://digilib.uns.ac.id/abstrak> pada tanggal 26 Mei 2009).
- Ghozali, Imam. 2005. Analisis Multivariate dengan Proses SPSS. Edisi 3. Semarang: UNDIP.
- Halim, Abdul. 2001. Menejemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- Halim, Abdul. 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, Syamsuddin. 2005. Desentralisasi dan Otonomi Daerah. Jakarta: LIPI Pres.
- Khawalaty.2000. Inflasi dan Solusinya. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Listiani, Nurlia. 2006. "faktor-faktor Determinan yang Mempengaruhi Inflasi di Indonesia Perioade 1970-2004" Jurnal ekonomi Pembangunan Vol XIV (1). Jakarta: LIPI.
- Mustofa, Zainal. 1995. Pengantar Statistik Terapan Untuk Ekonomi. Edisi Ke-2. Yogyakarta: Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Nanga, Muana. 2001. Makro Ekonomi. Edisi Perdana. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Purnastuti, Losina dan Indah Mustikawati. 2007. Ekonomi untuk SMA Kelas X. Jakarta: Grasindo.
- Raharja, Prathama. 2004. Pengantar Ekonomi Makro.Edisi Kedua. Jakarta: Fakultas EkonomiUI.
- Samuelson dan Nordaus. 1997. Mikro Ekonomi. Edisi ke -14. Jakarta: erlangga.
- Setiawan, E. 2005. Metodologo Peneitian Bisnis. Cetakan Pertama. Semarang: Yayasan Widya Manggala.
- Sukirno, Sadono. 2004. Pengantar Makro Ekonomi. Cetakan Ke limabelas. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

- Suyanto dan Jawoto Nusantoro. 2008. "Pengaruh Variabel Makro terhadap Penerimaan PAD di Kota Metro". (diunduh dari <http://yantoumn.multiply.com/jurnal>. pada tahun 2009).
- Tarigan, Robinson. 2006. Ekonomi Regional. Edisi Refisi. Jakarta: Bumi Aksara.
- Triwulantutik, Titik. 2006. Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia. Cetakan Ke-2. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Wardiyatmoko, K. 2006. Geografi Untuk Sma Kelas XII. Jakarta: Erlangga.
- Widodo, Suseno Trianto. 1990. Indikator Ekonomi. Jakarta: Kanisius